

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran selalu menjadi masalah serius di setiap negara, dan tampaknya sangat sulit dipecahkan. Menurut (Hartanto & Masjkuri, 2017) semua negara, baik itu negara maju maupun berkembang, tentu saja berhadapan dengan persoalan pengangguran. Namun, perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa negara-negara berkembang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan kepada penduduk negaranya yang tidak memiliki pekerjaan, sementara itu negara-negara maju dapat mengusahakan untuk memberi tunjangan kepada penduduk negaranya yang menganggur.

Perkembangan suatu negara dapat dianalisis melalui tingkat pengangguran yang ada. Tingkat pengangguran dapat mengungkap adanya ketidakmerataan atau perbedaan dalam redistribusi pendapatan di suatu negara. Pengangguran muncul karena jumlah penduduk usia kerja yang semakin meningkat tetapi jumlah lapangan kerja tidak mendukung atau memadai. Pengangguran mencakup masyarakat usia kerja (15 sampai dengan 64 tahun) yang tidak bekerja atau mencari pekerjaan. Keberadaan pengangguran dapat menjadi beban bagi masyarakat lainnya, karena peningkatan jumlah pengangguran dapat menyebabkan masalah kemiskinan akibat tingginya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, dan tingkat pengangguran menjadi penghalang bagi peningkatan lain.

Masalah pengangguran ini memang selalu menjadi suatu persoalan yang perlu dipecahkan dalam perekonomian negara Indonesia. Jumlah penduduk yang bertambah semakin besar setiap tahunnya membawa akibat bertambahnya jumlah angkatan kerja. Tingginya tingkat pengangguran dalam suatu negara dapat membawa dampak negatif terhadap perekonomian negara tersebut. Menurut (BPS, 2022), pengangguran terbuka (open unemployment) didasarkan pada konsep seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Pengangguran terjadi karena pertumbuhan angkatan tenaga kerja lebih tinggi dari pertumbuhan lapangan

pekerjaan yang ada. Pengangguran yang tinggi dapat menjadi sumber utama kemiskinan sehingga dapat memicu kriminalitas yang tinggi serta dapat menghambat 2ngkatan2an dalam jangka 2ngkata (Artriyani, 2013).

Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran diukur dengan satuan persen. Hal ini menunjukkan berapa banyak orang dalam 2ngkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan.

$$\text{Rumus: } TPT = \frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka}}{\text{Jumlah 2ngkatan kerja}} \times 100\%$$

Faktor-faktor seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kesempatan kerja diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mengukur kualitas sumber daya manusia suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan (harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pendapatan per kapita). IPM mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan dasar yang berpengaruh pada produktivitas tenaga kerja. Indeks pembangunan manusia diperkenalkan oleh United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan HDR (Human Development Report) (Badan Pusat Statistik, 2022). Indeks pembangunan manusia (IPM) atau dikenal dengan Human Development Index (HDI) merupakan tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas manusia disetiap daerah.

(Anggraini et al., 2023), menyatakan bahwa semakin tinggi angka indeks pembangunan manusia pada suatu wilayah, maka akan menyebabkan tingkat pengangguran semakin menurun dan sebaliknya apabila indeks pembangunan manusia rendah akan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran di wilayah tersebut. (Basri et al., 2019) menyatakan jika terjadi peningkatan IPM maka akan dapat mengurangi tingkat pengangguran. (Rasyida et al., 2024) mengungkapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dinilai dari tingkat pendidikan, tingkat

kesehatan, dan angka harapan hidup mampu menurunkan atau meningkatkan tingkat pengangguran. Artinya pertumbuhan ekonomi tidak bisa menjadi tolak ukur untuk menurunkan dan meningkatnya tingkat pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara atau daerah selama periode tertentu, yang biasanya diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi yang positif mencerminkan ekspansi aktivitas ekonomi yang dapat berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses transformasi kondisi finansial sebuah negara secara terus-menerus menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah menunjukkan angka yang terus meningkat, hal ini mencerminkan bahwa sektor ekonomi di negara atau daerah tersebut sedang berkembang dengan baik (Amir, 2007). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan pertumbuhan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan (Tambunan, 2004).

(Anggraini et al., 2023) sejalan dengan penelitian Mankiw (2000) mengatakan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran bersifat negatif, artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi membawa dampak terhadap penurunan jumlah pengangguran. Secara umum, pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas sehingga belum berdampak pada penurunan jumlah pengangguran yang signifikan. (Marliana, 2022) mengatakan pertumbuhan ekonomi (PE) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mengalami trend yang berlawananan. Pertumbuhan ekonomi mengalami cenderung meningkat sedangkan tingkat pengangguran terbuka cenderung menurun. Menurut hasil penelitian (Siti Patima et al., 2022), pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jambi belum mampu mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jambi belum mampu memperluas kesempatan kerja dalam jumlah yang cukup untuk menyerap kelebihan penawaran tenaga kerja.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu, yang menyebabkan penurunan daya beli uang sehingga jumlah uang yang sama tidak dapat membeli sebanyak barang atau jasa sebelumnya. Menurut (Mahrani et al., 2024), inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus sehingga mengakibatkan pelaku usaha membutuhkan lebih banyak dana untuk memenuhi kebutuhan produksi hingga biaya operasional. Inflasi ialah sebuah fenomena ekonomi yang sangat diperhatikan oleh semua negara didunia, termasuk Indonesia saat terjadinya kenaikan harga-harga secara umum. Inflasi ini menyebabkan orang lebih memilih alternatif aktifitas bekerja dari pada berinvestasi pada lembaga-lembaga keuangan dan investasi. Hal ini terjadi karena inflasi mengakibatkan 3 hal, yaitu (1) lemahnya efisiensi dan produktifitas produksi, (2) kenaikan biaya modal, (3) ketidakjelasan ongkos dan pendapatan di masa yang akan datang (Mahrani et al., 2024).

Menurut Philips (1958), terdapat hubungan negatif (trade-off) antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Artinya, saat inflasi tinggi pengangguran cenderung rendah dan sebaliknya. Namun, dalam jangka panjang, hubungan ini bisa hilang menurut Milton Friedman dan Phelps, karena ekspektasi inflasi akan menyesuaikan, sehingga pengangguran kembali ke tingkat alaminya (natural rate of unemployment).

Kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk bekerja, yang ada dari suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan demikian kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan yang sudah diduduki dan masih lowong, sehingga semakin besar dan semakin luas kesempatan kerja tersedia maka semakin besar pengangguran dapat berkurang. Kesempatan kerja yang ada di masyarakat dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja. Produktivitas tenaga kerja di Provinsi Jambi perlu lebih ditingkatkan lagi agar dapat sebanding dengan kenaikan tingkat upah yang ditentukan dalam upah minimum.

(Chandra et al., 2020) menyatakan kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, bila terjadi peningkatan kesempatan kerja sebanyak seribu orang maka pengangguran di Kota Jambi akan meningkat sebesar 0,210 ribu orang. (R. Rosalina, Prihanto. P, 2018) adanya kenaikan kesempatan kerja akan menambah

permintaan tenaga kerja dan permintaan ini akan memenuhi penawaran tenaga kerja. Pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya akan menambah kesempatan angkatan kerja terutama angkatan kerja terdidik sehingga akan menurunkan jumlah pengangguran terdidik di Provinsi Jambi.

Table 1.1 Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (ribu jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk Provinsi Jambi (ribu jiwa)
2020	3.548,2
2021	3.585,1
2022	3.631,1
2023	3.679,2
2024	3.724,3
Rata-rata	3.633,6

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2024

Berdasarkan tabel 1.1 memuat data jumlah penduduk Provinsi Jambi dari tahun 2020-2024 terlihat bahwa jumlah penduduk Provinsi Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 penduduk Provinsi Jambi adalah 3.548,2 jiwa, dan pada tahun 2024 jumlah penduduk meningkat menjadi 3.724,3 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi dari tahun 2020-2024 relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1% per tahun.

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi 2020-2024

Tahun	Pengangguran Terbuka (ribu jiwa)	Persentase (%)
2020	93,990	5,13
2021	93,754	5,09
2022	86,459	4,59
2023	85,576	4,53
2024	86,075	4,48
Rata-rata	89,17	4,76

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2024

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Jambi mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, TPT Provinsi Jambi sebesar 5,13%. Angka ini relatif tinggi, kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak sektor usaha tutup atau

mengurangi jumlah tenaga kerja. Seiring berjalannya waktu karena ekonomi Kembali pulih secara bertahap, TPT mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 4.48%. Penurunan TPT ini menandakan adanya perbaikan kondisi pasar tenaga kerja sehingga makin banyak tenaga kerja terserap baik di sektor formal maupun informal.

Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi tahun 2020-2024

Tahun	IPM
2020	72,29
2021	72,69
2022	73,11
2023	73,73
2024	74,36
Rata-rata	73,24

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan tabel 1.3, dapat dilihat bahwa perkembangan IPM Provinsi Jambi dari tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang positif dan meningkat. Pada tahun 2020, IPM Provinsi Jambi berada di angka 72,29, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya, namun pertumbuhannya melambat akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan tekanan pada sektor kesehatan dan ekonomi. Seiring pemulihan ekonomi dan kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan manusia, IPM Jambi meningkat menjadi 72,69 di tahun 2021 dan terus naik menjadi 73,11 pada tahun 2022. Pada tahun 2023, IPM kembali meningkat ke 73,73, yang mencerminkan keberhasilan program peningkatan pendidikan, akses kesehatan, dan daya beli masyarakat. Untuk tahun 2024, meskipun data resmi belum dirilis sepenuhnya, proyeksi atau target IPM Jambi diperkirakan mencapai angka 74,36. Secara keseluruhan, IPM Provinsi Jambi tetap berada pada level tinggi, menandakan kemajuan pembangunan manusia yang tetap terjaga. Ini menunjukkan arah pembangunan manusia yang semakin baik di Provinsi Jambi.

Tabel 1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2020-2024

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)
2020	0,51
2021	3,70
2022	5,12
2023	4,66
2024	4,51
Rata-rata	3,70

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah (dalam hal ini Provinsi Jambi) dalam periode tertentu. Data ini menjadi indikator utama dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Laju pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan pada akhirnya menurunkan tingkat pengangguran. Selama periode 2020 hingga 2024, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi menunjukkan tren yang relatif positif dengan puncak tertinggi pada tahun 2022, meskipun sempat mengalami perlambatan signifikan akibat pandemi COVID-19.

Berdasarkan data laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan yang cukup stabil dan pulih dari dampak pandemi. Data ini menunjukkan potensi besar untuk pengembangan sektor-sektor strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.5 Tingkat Inflasi Provinsi Jambi 2020-2024

Tahun	Inflasi (persen)
2020	3,09
2021	1,67
2022	6,35
2023	0,56
2024	1,43

Sumber: BPS, Provinsi Jambi 2024

Inflasi berkaitan dengan kenaikan umum dalam tingkat harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi selama periode waktu tertentu. Akibatnya, daya beli uang menurun, yang berarti dengan jumlah uang yang sama bisa membeli lebih sedikit barang dan jasa daripada sebelumnya.

Inflasi ini terjadi ketika permintaan total barang dan jasa dalam ekonomi meningkat melebihi kapasitas produksi. Ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti peningkatan pengeluaran konsumen, belanja pemerintah, atau investasi bisnis. Ketika permintaan melebihi penawaran, harga cenderung naik.

Pada tahun 2020, tercatat inflasi mencapai 3,09%, menunjukkan adanya tekanan harga yang signifikan di tengah awal pandemi COVID-19. Lonjakan ini mungkin dipicu oleh gangguan distribusi barang serta kenaikan harga barang kebutuhan pokok karena adanya pembatasan aktivitas ekonomi. Pada tahun 2022, inflasi melonjak tajam menjadi 6,35%, yang menjadi angka tertinggi dalam rentang lima tahun tersebut. Lonjakan signifikan ini diduga disebabkan oleh pemulihan permintaan setelah pandemi, kenaikan harga energi dan makanan di tingkat global, serta pelemahan nilai tukar yang berpengaruh terhadap harga barang impor. Tahun 2023 inflasi menunjukkan tanda-tanda perbaikan, pada angka 0,56%. Penurunan ini menggambarkan langkah-langkah pemerintah dalam menstabilkan harga serta pemulihan rantai pasokan logistik. Namun, pada tahun 2024, inflasi kembali mengalami peningkatan menjadi 1,43%.

Berlandaskan dari latar belakang, studi ini melakukan analisis untuk mengetahui dan menganalisis variabel indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kesempatan kerja terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jambi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini menemukan dua masalah utama:

1. Bagaimana perkembangan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kesempatan kerja terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jambi.

2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kesempatan kerja terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jambi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari studi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kesempatan kerja dan tingkat pengangguran di Provinsi Jambi.
2. Untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kesempatan kerja terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi dalam kajian ekonomi ketenagakerjaan, khususnya terkait bagaimana dinamika indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kesempatan kerja berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di suatu daerah.
 - b. Mampu dijadikan referensi dan sumber bacaan yang ingin mengkaji isu serupa di daerah lain ataupun dengan variabel tambahan lainnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kesempatan kerja terhadap tingkat pengangguran di daerah.
 - b. Sebagai acuan dalam memilih alternatif kebijakan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja khususnya bagi tenaga kerja produktif.